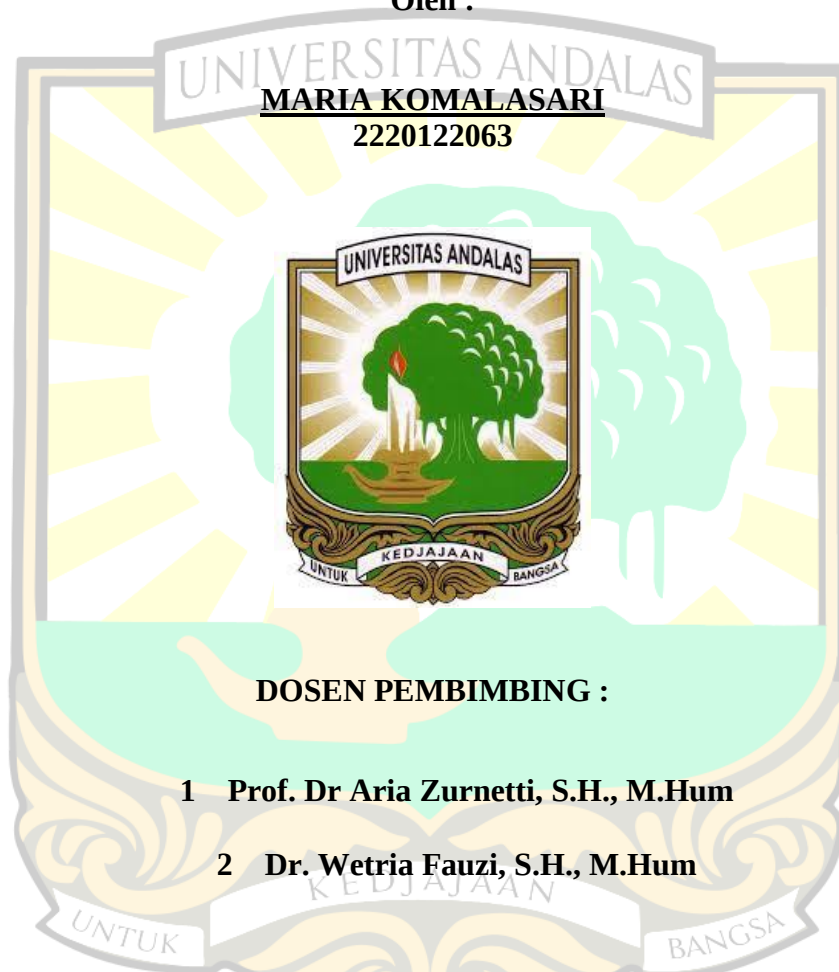


**TESIS**

**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA  
PERJANJIAN UTANG PIUTANG  
(PUTUSAN NOMOR 5/Pdt.G/2023/PN Btl)**

**Oleh :**

**MARIA KOMALASARI**  
**2220122063**



**DOSEN PEMBIMBING :**

- 1 Prof. Dr Aria Zurnetti, S.H., M.Hum**
- 2 Dr. Wetria Fauzi, S.H., M.Hum**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA  
PERJANJIAN UTANG PIUTANG  
(PUTUSAN NOMOR 5/Pdt.G/2023/PN Btl)**

**(Maria Komalasari, 2220122063, Magiste Kenotariatan, Fakultas Hukum,  
Universitas Andalas, 120 Halaman, 2025)**

**ABSTRAK**

Notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam hal ini negara, dimana negara telah memberikan kepercayaan kepada notaris untuk menjalankan sebagian urusan atau tugas negara, khususnya dalam bidang hukum perdata. Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Mengenai akta otentik diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris telah diatur tentang Kewenangan Notaris pada Pasal 15 ayat (1) UUJN, terkait dengan kewajiban notaris, dimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan Pasal 16 ayat (1) huruf m, apabila notaris tidak melaksanakan amanat pada pasal tersebut, notaris dituntut untuk bertanggungjawab dan akan dikenakan sanksi baik terhadap akta yang dibuat notaris maupun terhadap notaris tersebut sebagaimana yang terdapat dalam kasus Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Btl. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1. Bagaimana Kesalahan yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta otentik pada Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/Pn Btl? 2. Bagaimanakah Kedudukan akta perjanjian utang piutang pada Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/Pn Btl? 3. Bagaimana Pertanggungjawaban Notaris terhadap akta perjanjian utang piutang pada Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Btl)?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuidis normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan, sumber data sekunder serta analisis kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah 1. Pada Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Btl Notaris telah melakukan kesalahan berupa kesengajaan dimana notaris dengan sengaja membuat akta yang merugikan salah satu pihak. 2. Kedudukan akta yang dibuat oleh notaris memiliki nilai pembuktian yang sempurna apabila seorang notaris dalam membuat akta tersebut memperhatikan mengai kewajiban dan larangan yang terdapat didalam UUJN. 3. Pertanggungjawaban notaris terkait dengan akta tersebut yaitu notaris bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya, dimana akta yang dibuat oleh notaris terebut hanya berdasarkan keinginan salah satu pihak, dalam hal ini pihak penghadap merasa dirugikan dan notaris menjadi turut tergugat dalam perkara tersebut dan dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, tidak hanya itu, notaris juga mendapat sanksi peringatan tertulis dari Majelis Pengawas Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 08/Pts/Mj.PWN DIY/X/2022. Saran dari penelitian ini yaitu notaris harus lebih berhati-hati ketika henda membuat suatu akta otentik, notaris harus memperhatikan kewajiban dan larangan dalam UUJN agar notaris tidak menjadi turut tergugat atau bahkan tergugat dalam perkara peradilan.

**Kata Kunci: Tanggungjawab, Notaris, Akta Notaris**

## **NOTARY LIABILITY FOR DEBT AND RECEIVABLES AGREEMENT DEED**

**(DECISION NUMBER 5/Pdt.G/2023/PN Btl)**

**(Maria Komalasari, 2220122063, Master of Notary, Faculty of Law, Andalas  
University, 120 Pages, 2025)**

### **ABSTRACT**

Notaries are an extension of the government, in this case the state, where the state has given trust to notaries to carry out some of the affairs or duties of the state, especially in the field of civil law. Notaries are regulated in Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions. Regarding authentic deeds, they are regulated in Article 1868 of the Civil Code. In the Notary Position Law, the Authority of Notaries has been regulated in Article 15 paragraph (1) of the UUJN, related to the obligations of notaries, which are regulated in Article 16 paragraph (1) letter a and Article 16 paragraph (1) letter m, if the notary does not carry out the mandate in the article, the notary is required to be responsible and will be subject to sanctions both on the deed made by the notary and against the notary as obtained in the case of Decision Number 5/Pdt.G/2023/PN Btl. Formulation The problems in this study are 1. What are the mistakes made by notaries in making authentic deeds in Decision Number 5/Pdt.G/2023/Pn Btl? 2. What is the position of the deed of agreement on debts and receivables (Study of Decision Number 5/Pdt.G/2023/PN Btl)? 3. What is the notary's accountability for the deed of debt and receivables agreement (Study of Decision Number 5/Pdt.G/2023/PN Btl)?. The research method used is normative juris with a case approach and a legislative approach, secondary data sources and qualitative analysis. The results of this study are 1. In Decision Number 5/Pdt.G/2023/PN Btl, the Notary committed an intentional error where the notary deliberately made a deed that was detrimental to one of the parties. 2. The position of the deed made by a notary has a perfect evidentiary value if a notary in making the deed pays attention to the obligations and prohibitions contained in the UUJN, if the deed made by the notary is not in accordance with the UUJN, then the position of the deed becomes a deed in hand and the deed can also be canceled 3. The notary's liability related to the deed is that the notary is responsible for the deed he made, where the deed made by the notary is only based on the wishes of one of the parties, in this case the opposing party feels harmed and the notary becomes a co-defendant in the case and is declared to have committed an unlawful act, not only that, the notary also received a written warning sanction from the Yogyakarta Special Region Supervisory Council Number: 08/Pts/Mj.PWN DIY/X/2022. The suggestion from this study is that notaries must be more careful when making an authentic deed, notaries must pay attention to the obligations and prohibitions in the UUJN so that notaries do not become co-defendants or even defendants in judicial cases.

**Keywords: Responsibility, Notary, Notary Deed**